

Analisis Pengembangan Kawasan Agropolitan Melalui Inovasi BAMELE di Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

Kurnia Ayu Puspita¹⁾, Sapto Pramono²⁾, Sri Roekminiati³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: kurniayupuspita31@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Nganjuk merupakan penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, kurangnya subsidi pupuk menjadikan produksi bawang merah terhambat. Salah satunya di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor sebagai penghasil bawang merah terbesar dan juga merasakan dampak dari adanya kelangkaan pupuk ketika musim tanam tiba. Untuk mengatasi kelangkaan pupuk pemerintah membuat sebuah inovasi BAMELE. Selain itu inovasi ini diharapkan mampu mengembangkan kawasan agropolitan di Kabupaten Nganjuk. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kinerja pengembangan BAMELE; 2) Untuk menganalisis tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan; serta 3) Untuk merekomendasikan kebijakan supaya BAMELE bisa lebih baik kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan memperoleh data dari observasi lapangan, wawancara dengan informan, dan dokumentasi yang menggunakan pendekatan teori William N. Dunn. Hasil penelitian ini merujuk pada teori William N. Dunn dalam 3 indikator yaitu: (1) Perumusan: sebelum adanya inovasi BAMELE ini petani bawang merah mengeluh karena minimnya subsidi pupuk untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Sedangkan kelangkaan pupuk melatarbelakangi pemerintah untuk mengatasi permasalahan agar petani bawang merah bisa tetap panen tanpa adanya subsidi pupuk dari pemerintah, (2) Pemantauan: dengan adanya dukungan dari pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk yang memberikan pelatihan untuk pengolahan bawang merah supaya bawang merah itu tidak hanya di jual mentahan saja, tetapi bisa dikembangkan dengan berbagai olahan yang memiliki cita rasa tinggi karena dengan ini dapat meningkatkan perekonomian para petani di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, serta (3) Evaluasi: bahwa belum adanya peraturan yang mengatur khusus mengenai inovasi BAMELE dan hanya mengacu pada Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 9 tentang RJMD dapat berdampak pada ketidakstabilan harga bawang merah di pasar karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang harga bawang merah di pasar. Selain itu terdapat hambatan dalam melakukan inovasi BAMELE yaitu informasi mengenai inovasi BAMELE masih sangat minim, belum ada koperasi khusus untuk petani bawang merah, dan juga belum ada sentra khusus ikan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan yaitu perlunya pendekatan pemerintah terhadap petani supaya inovasi ini bisa digunakan di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk agar bisa terwujud kawasan agropolitan.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Subsidi Pupuk, Inovasi BAMELE

Abstract

Nganjuk Regency is the largest shallot producer in East Java. However, this is inversely proportional to conditions in the field, the lack of fertilizer subsidies has hampered shallot production. One of them is in Banaran Kulon Village, Bagor District, which is the largest producer of shallots and also feels the impact of the scarcity of fertilizer when the planting season arrives. To overcome the scarcity of fertilizer, the government created a BAMELE innovation. Apart from that, this innovation is expected to be able to develop agropolitan areas in Nganjuk Regency. The objectives of this research are: 1) To determine the development performance of BAMELE; 2) To analyze the factors that contribute to success and failure; and 3) To recommend policies so that BAMELE can be better in the future. This research uses qualitative methods, by obtaining data from field observations, interviews with informants, and documentation using William N. Dunn's theoretical approach. The results of this research refer to William N. Dunn's theory in 3 indicators, namely: (1) Formulation: before the BAMELE innovation, shallot farmers complained about the lack of fertilizer subsidies for the Nganjuk Regency area. Meanwhile, the scarcity of fertilizer is the background for the government to

overcome the problem so that shallot farmers can continue to harvest without any fertilizer subsidies from the government, (2) Monitoring: with support from the government, the Nganjuk Regency Agriculture Service which provides training for shallot processing so that the shallots are not only used in sell only raw, but can be developed with various preparations that have a high taste because this can improve the economy of farmers in Banaran Kulon Village, Bagor District, and (3) Evaluation: that there are no regulations that specifically regulate BAMELE innovation and only refer to in Regent Regulation no. 33 of 2018 Article 1 Paragraph 9 concerning RJMD can have an impact on the instability of shallot prices in the market because there are no special regulations governing shallot prices in the market. Apart from that, there are obstacles in implementing BAMELE innovation, namely that information regarding BAMELE innovation is still very minimal, there are no special cooperatives for shallot farmers, and there are also no special fish centers. The resulting policy recommendation is the need for a government approach to farmers so that this innovation can be used throughout the Nganjuk Regency area so that an agropolitan area can be created.

Keywords: Policy Analysis, Fertilizer Subsidies, BAMELE Innovation

A. LATAR BELAKANG

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/1998 Bahan Makanan Dan Minuman Yang Termasuk Ke Dalam Bahan Pokok Diyakini Mampu Melengkapi Nutrisi Sehat Masyarakat Dari Berbagai Kalangan Usia Dan 3 Jenis Kelamin. Sembilan bahan pokok tersebut diantaranya, beras, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih, gula, garam, daging sapi, susu, telur, dan gas elpiji. Bawang merah termasuk ke dalam sembilan bahan pokok yang harus ada dalam rumah tangga, hal ini menjadikan bawang merah bahan pokok yang mudah ditemukan di masyarakat (Menteri Perindustrian dan Perdagangan, 1998).

Bawang merah merupakan komoditas hortikultura berumur pendek, yang memiliki umbi berlapis dan mempunyai nilai komersial resiko tinggi. Mempunyai kandungan gizi senyawa yang tergolong zat non gizi dan enzim yang berfungsi untuk terapi. Selain untuk bumbu masakan bawang merah ternyata memiliki banyak manfaat untuk kesehatan di antaranya kesehatan jantung, memperbaiki sistem pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh melawan radikal bebas dan masih banyak lainnya. Bawang merah utuh mengandung energi sebesar 50,63 kkal, karbohidrat, 10,92%, protein 1,56%, lemak 0,07% (Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 2020).

Budidaya bawang merah dilakukan di daerah dataran rendah yang beriklim kering

dengan suhu agak panas dan cuaca cerah. Musim tanam bawang merah satu tahun dua kali pada april dan oktober. Dengan umur tanam sekitar 60-80 hari setelah masa tanam. Suhu optimal untuk tanaman bawang merah di dataran rendah berkisaran antara 25-32°C. Namun, bawang merah bisa juga di tanam pada dataran tinggi, tetapi memerlukan waktu tanam yang cukup lama dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Dengan estimasi waktu sekitar 90-110 hari setelah tanam. Ketinggian antara 900-1400 mdpl, dengan suhu berkisar 16-20°C (Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Lampung, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik (2021), Kabupaten Nganjuk sendiri merupakan salah satu penyumbang bawang merah di Indonesia, dengan jumlah sebesar 1.936.524 ton pada tahun 2021. Produksi bawang merah di Kabupaten terus mengalami peningkatan dari tahun 2019. Dari hasil jual yang tinggi membuat warga Kabupaten Nganjuk beralih dari petani padi menjadi petani bawang merah. Ini menjadikan Kabupaten Nganjuk terkenal dengan produksi bawang merah yang melimpah. Membuat Kabupaten Nganjuk terkenal dengan sentra bawang merah, banyak warga luar yang berdatangan hanya sekedar untuk membeli bibit maupun bawang merah yang nantinya dijual kembali ke daerahnya. Bibit bawang merah Kabupaten Nganjuk menjadi bibit unggulan karena bisa ditanam disemua kondisi lahan. Kabupaten Nganjuk selain memproduksi bawang merah

untuk kebutuhan rumah tangga juga memproduksi bibit bawang merah. Banyak petani yang memproduksi bawang merah khusus untuk bibit menurut petani harga bibit bawang merah jauh lebih mahal, ini membuat masyarakat gencar dalam memproduksi bawang merah.

Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Nganjuk 5 diantara sebagai sentra produksi bawang merah di Kabupaten Nganjuk yaitu, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Gondang, Kecamatan Bagor, dan Kecamatan Wilangan dengan area keseluruhan seluas ± 16.780 hektar. Dari situlah Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengatakan perlunya pengembangan kawasan agropolitan perlu dilakukan supaya dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat mengingat karena Kabupaten Nganjuk sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Pembangunan kawasan agropolitan yang diharapkan yaitu mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya sistem dan usaha berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan 12 terdesentralisasi sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat petani agar lebih produktif (Portal Informasi Pemerintah Nganjuk, 2020).

Tetapi program ini belum berjalan dengan baik budidaya ini masih ada beberapa kendala seperti, dari pemilihan bibit berkualitas yang terkadang cukup sulit ditemukan serta mahal harganya. Bupati Nganjuk memberikan arahan sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 045/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2016 Tentang Bawang Merah Varietas Tajuk yang Digunakan Untuk Budidaya Bawang Merah Petani Nganjuk. Bawang merah ini mempunyai daya adaptasi dengan baik pada musim kemarau dan tahan terhadap musim hujan, sesuai di dataran rendah maupun dataran tinggi, ini sesuai dengan kondisi tanah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Subsidi pupuk sangat minim, ketika waktu tanam tiba pupuk menjadi langka dan kurang dalam pengalokasiannya sehingga tidak mencukupi kebutuhan petani.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Cara Penetapan Alokasi Dan Harga

Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam pengalokasian pupuk bersubsidi harus sesuai yang telah ditetapkan. Pengurangan pupuk subsidi membuat harga pupuk nonsubsidi naik tinggi. Dengan ini pemerintah Nganjuk mengambil langkah dengan membuat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/65/K/411.012/2021 Tentang Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida. Tujuannya untuk mengawasi terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan pupuk dan pestisida di Kabupaten Nganjuk.

Namun, hal ini belum maksimal terkadang masih ada petani yang kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Selain pupuk, petani juga masih kekurangan dalam modal tanam bawang merah. Banyak para petani yang menggadaikan sertifikat tanahnya untuk modal pada musim tanam. Petani tidak diberi bantuan modal dari pemerintah, lebih memprihatinkan lagi nasib petani yang melakukan sistem sewa sawah mereka hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari hasil panen. Belum ada bantuan bibit bawang merah dari pemerintah untuk para petani bawang merah. Harga yang tidak stabil membuat para petani bawang merah cemas akan kesejahteraannya. Perlunya peran koperasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan adanya koperasi diharapkan masalah yang muncul pada saat panen raya dapat teratasi.

Menteri Pertanian memberikan arahan untuk terus meningkatkan inovasi produktivitas dan kesejahteraan petani serta produk bawang merah berdaya saing. Bupati Nganjuk dalam pendampingannya memberikan gambaran supaya bawang merah di tanam secara ramah lingkungan. Dari arahan Bupati akhirnya petani membuat inovasi baru dengan cara budidaya BAMELE (Bawang Merah Lele), dimana inovasi ini menggabungkan antara dua aspek yaitu aspek pertanian dan peternakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pengembangan BAMELE sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam inovasi BAMELE?
3. Rekomendasi kebijakan seperti apakah yang dapat dirumuskan agar pelaksanaan kebijakan BAMELE di Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk lebih baik kedepan?

B. LANDASAN TEORITIS

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau dikenal dengan istilah *public policy*, *public policy* berasal dari istilah bahasa Inggris. Menurut Robert Eyestone (1971), kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung arti pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Budi Winarno, 2002).

Charles O. Jones, dalam “*An Itroduction to the study of Public Policy*”, mengemukakan bahwa *public policy* merupakan antar hubungan di antara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya (Charles O. Jones, 1970). Menurut Thomas R. Dye, “*Public policy is whatever government chooses to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak).

Pengertian ini mengandung implikasi sebagai berikut:

- a) Bahwa kebijakan pemerintah merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b) Bahwa kebijakan pemerintah itu tidak hanya dinyatakan bentuknya, tetapi dilaksanakan secara nyata.
- c) Bahwa kebijakan pemerintah dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan

harus mempunyai landasan maksud dan tujuan.

- d) Bahwa kebijakan pemerintah harus senantiasa ditunjukkan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan terbagi menjadi dua macam, yaitu *intra* dan *extra societal environment*. Lingkungan ini mengandung dua *inputs*, yaitu *demands* atau *claims* dan *support* kemudian diproses ke dalam sistem politik selanjutnya melahirkan *policy outputs*, berupa *policy* dan *decision*. *Policy outputs* kembali ke *social environment* sebagai respon (*feedbacks*) terhadap *demands* atau *claims* dari *social environment* (Thomas R. Dye, 1978 dan Subarsono, 2006).

Kebijakan publik dibuat pasti ada maksud dan tujuan, maksud dan tujuan kebijakan publik adalah untuk memecahkan suatu masalah publik yang sedang tumbuh kembang dikalangan masyarakat. Tidak semua masalah publik bisa melahirkan suatu kebijakan. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan semua orang untuk ikut dalam mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik dibuat oleh lembaga legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian dijalankan dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki wewenang, hukum, politik, dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik bersifat memaksa yang sah, dan harus dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Adanya kebijakan publik mampu mensejahterakan masyarakat, karena semua kehidupan masyarakat di atur dalam peraturan. Lingkup kebijakan publik sangat luas diantaranya pada sektor pertanian, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan masih banyak lainnya. Bentuk kebijakan publik di Indonesia beraneka ragam mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan

Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwali), Peraturan Bupati (Perbup), dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 9 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang mana disini berkaitan dengan sektor pertanian. Peraturan Bupati tersebut dibuat karena mengingat bawang merah di Kabupaten Nganjuk setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam produksi.

2. Analisis Kebijakan

William N. Dunn (1981), menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah *“an applied social science discipline which use multiple method of inquiry and argument to produce and transform policy relevant information that may be utilized in political setting to resolve policy problems”*. (Suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penyelidikan dan pertimbangan untuk menghasilkan dan mengubah bentuk informasi kebijakan yang relevan untuk digunakan dalam memutuskan masalah-masalah kebijakan dalam penataan politik).

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakan dapat dibedakan antara kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

3. Model Analisis Kebijakan Retrospektif

William N. Dunn (1981) membedakan tiga bentuk utama dari analisis kebijakan publik, salah satunya yaitu analisis kebijakan retrospektif. Analisis kebijakan retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Analisis kebijakan

restropektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat kebijakan atau setelah suatu kebijakan diimplementasikan (William N. Dunn).

Terdapat 3 gaya analisis restropektif berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh sekelompok analisis, yaitu:

- a) Analisis yang berorientasi disiplin, lebih berfokus pada pengembangan dan pengujian teori dasar dalam disiplin keilmuan dan menjelaskan sebab akibat dari kebijakan.
- b) Analisis yang berorientasi masalah, menitik beratkan pada aspek hubungan sebab akibat dari kebijakan dan bersifat terapan, namun masih bersifat umum.
- c) Analisis yang berorientasi aplikasi, menjelaskan hubungan kausalitas dan lebih tajam untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari kebijakan dan pelaku kebijakan. informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan khusus, merumuskan masalah, membangun alternatif baru dari kebijakan, serta mengarah pada pemecahan masalah yang praktis

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang berjudul “Analisis Pengembangan Kawasan Agropolitan Melalui Inovasi BAMELE di Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk”.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini menggunakan model Analisis dari William N. Dunn.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Desa Banaran Kulon dan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Data diperoleh melalui dokumentasi, observasi,

dan wawancara mendalam kepada informan. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman (1984) yang terdiri dari koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Kinerja Inovasi BAMELE

Pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada teori William N. Dunn yang disandingkan dengan penelitian terdahulu untuk dapat menemukan sebuah analisis penelitian, diantaranya:

a) Perumusan Masalah

Latar belakang adanya inovasi BAMELE adalah karena kelangkaan pupuk ketika musim tanam tiba, selain itu ketidakstabilan harga bawang merah ketika musim panen raya dan juga belum adanya pengolahan hasil bawang merah. Sebelum adanya inovasi petani sering mengeluhkan masalah kelangkaan pupuk yang terjadi, padahal para petani sudah mendaftar kepada ketua kelompok tani dan akan di input kedalam E-RDKK tetapi tetap saja belum berjalan dengan maksimal. Akhirnya petani mengalami kegagalan panen dikarenakan bawang merah kekurangan asupan pupuk. Dengan itu harga bawang merah menjadi turun ketika musim panen raya.

Pemerintah belum bisa mengatasi masalah kelangkaan pupuk dan juga ketidakstabilan harga bawang merah ketika musim panen raya. Hal ini tidak terjadi di Kabupaten Nganjuk saja melainkan di seluruh Indonesia. Akhirnya PLT Bupati Nganjuk dan juga Dinas Pertanian turun tangan untuk mengambil langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan yaitu dengan menggunakan inovasi BAMELE. Inovasi ini selain digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan juga diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai kawasan agropolitan. Dimana dalam keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan akan

memberikan dampak terhadap ekonomi secara nyata dalam meningkatkan pendapatan, pemerataan kesejahteraan, perbaikan penanganan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan pertanian, yang mana dalam produksi bawang merah mampu berdaya saing tinggi dengan hasil produksi bawang merah dari daerah lain.

Pada penelitiannya, Wicaksono, dkk (2017:66) memaparkan bahwa terbukti daya saing bawang merah lokal lebih unggul ketimbang bawang merah import. Terbukti dari adanya peningkatan produksi bawang merah di Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, sebelum adanya inovasi BAMELE petani hanya menghasilkan bawang merah sebesar 3.088. Setelah adanya inovasi BAMELE produksi bawang merah meningkat menjadi 421,153 kwintal.

b) Pemantauan

Dari segi sumber daya manusia yang ada di Desa Banaran Kulon sudah cukup mendukung dengan luas lahan yang ada. Selain itu dalam mengembangkan kawasan agropolitan perlu adanya dukungan baik dari pemerintah maupun stakeholder yang terlibat. Para petani harus memiliki wawasan yang kreatif, inovatif dan mampu menghadapi persaingan global. Dengan itu dirasa petani stakeholder yang terlibat dalam inovasi BAMELE dirasa cukup baik. Dukungan sendiri diberikan dari Dinas kepada ibu-ibu petani yang ada di Desa Banaran Kulon melalui pelatihan dalam pengolahan bawang merah. olahan bawang merah sendiri yang sebelumnya hanya di goreng saja sekarang bisa dijadikan berbagai olahan yang mengandung cita rasa yang tinggi.

Dalam mengembangkan kawasan agropolitan perlunya dukungan sarana dan prasarana yang baik diantaranya yaitu jalan usaha tani, perpipaan, perpompaan, dan juga saluran irigasi dimana dalam

inovasi BAMELE ini sudah dirasa cukup baik, terbukti karena BAMELE tidak perlu banyak dalam menggunakan sarana prasarana dan juga bebas pestisida. Namun dalam mengembangkan inovasi BAMELE perlu adanya keahlian yang khusus dan tingkat proteksi yang cukup, karena inovasi ini langsung menggabungkan dua aspek pertanian dan perikanan sekaligus.

Kesimpulan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu Nolasary (2019:7) menjelaskan bahwa dalam melakukan budidaya bawang merah tingkat proteksi pemerintah sudah berjalan dengan baik, sejalan dengan harga privat output bawang merah di Kabupaten Solok lebih tinggi dari harga sosialnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan dari pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, yang memberikan pelatihan untuk pengolahan bawang merah.

c) Evaluasi

Dalam melakukan inovasi BAMELE belum ada kebijakan khusus yang mengatur, hal ini menjadikan inovasi BAMELE ini belum mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tetapi dari pandangan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk bahwa dengan inovasi ini bisa mengembangkan kawasan agropolitan karena inovasi ini dinilai cukup unik dan belum ada yang menggunakan inovasi ini. Dinas Pertanian dalam melakukan sosialisasinya mengenai pengembangan kawasan agropolitan melalui inovasi BAMELE mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2018 pasal 1 ayat 9 Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Nolasary (2019:10) bahwa kebijakan yang diterapkan pada input maupun output secara simultan memberikan dampak bagi para petani bawang merah di Kabupaten Solok.

Tingkat proteksi kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap input produksi di Kabupaten Solok masih sangat rendah.

2. Faktor Pendukung Dalam Analisis Inovasi BAMELE

Terdapat beberapa faktor pendukung untuk keberhasilan inovasi BAMELE diantaranya sebagai berikut:

a) Penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat memberikan Bunga yang cukup ringan dan tidak ada jaminan. Tujuan dari KUR yaitu untuk memberikan bantuan kepada para pelaku usaha dalam hal permodalan, suku bunga yang diberikan hanya 6% saja.

b) Pemberian Bantuan Bibit Bawang Merah

Melalui bantuan bibit diharapkan petani mampu menghasilkan produksi bawang merah melalui inovasi BAMELE ini bisa semakin berkembang dan dapat menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai kawasan agropolitan dengan melalui produksi bawang merah.

c) Pelatihan Pengolahan Bawang Merah

Pelatihan pengolahan ini merupakan salah satu dukungan pemerintah dalam mengolah bawang merah menjadi olahan dengan cita rasa yang tinggi. Dengan adanya pelatihan ini dapat membuat ibu-ibu produktif dan bisa menghasilkan pemasukan.

d) Pembentukan Organisasi Paguyuban Bakul Brambang

Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk membuat komunitas petani bawang merah dimana nanti bisa saling tukar pikiran dan kerja sama tentang inovasi BAMELE untuk kemudian bisa lebih disebarluaskan ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Nganjuk.

3. Faktor Penghambat Dalam Analisis Inovasi BAMELE

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam inovasi BAMELE, diantaranya yaitu:

- a) Kurang informasi
- b) Belum ada koperasi petani bawang merah
- c) Belum ada sentra khusus ikan lele

4. Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempertahankan Inovasi BAMELE

Rekomendasi memungkinkan analisis menghasilkan informasi tentang serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat. Dalam rangka mengatasi semua kendala tersebut, peneliti menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan, diantaranya yaitu:

- a) Peneliti merekomendasikan perlu adanya sentra khusus lele organik, sehingga petani bisa langsung menyalurkan hasil budidaya ikan lele kepada para pedagang yang ada di sentra tersebut.
- b) Mengenai informasi, peneliti memberikan rekomendasi bahwa mengenai informasi inovasi BAMELE perlu di lakukan lebih serius lagi. Sesuai dengan arahan PLT Bupati sekarang bawang merah harus bisa lulus sertifikasi prima maka dari itu BAMELE ini sudah termasuk kedalam sertifikasi prima. Perluasan informasi bisa dilakukan melalui rapat atau sosialisasi kepada para ketua poktan dan melalui pemantauan situs web. Dimana nantinya para ketua gapoktan menginput data para petani yang sudah menggunakan inovasi BAMELE ini. Supaya nantinya bisa mendapatkan dukungan dan pembinaan untuk mengembangkan inovasi ini lebih baik lagi.
- c) Perlu adanya pembuatan koperasi supaya petani tidak kesulitan dalam memasarkan hasil olahan bawang merah dan juga para petani bisa meminjam bantuan modal kepada koperasi.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian bahwa analisis kinerja inovasi BAMELE di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor dapat

disimpulkan bahwa berdasarkan analisis kinerja BAMELE dalam analisis retrospektif yaitu:

a) Perumusan Masalah

Inovasi BAMELE itu timbul karena terjadinya kelangkaan pupuk ketika musim tanam tiba pemerintah berupaya supaya petani tetap berproduksi meskipun tanpa penggunaan pupuk subsidi, akhirnya PLT Bupati Kabupaten Nganjuk bersama dengan Dinas Pertanian memberikan arahan subaya menggunakan budidaya secara ramah lingkungan. Inovasi ini diberinama BAMELE, setelah adanya inovasi ini adaya peningkatan produksi bawang merah di Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor. Inovasi ini juga diharapkan mampu mengembangkan kawasan agropolitan di Kabupaten Nganjuk.

b) Pemantauan

Dalam proses inovasi sudah ada dukungan baik dari pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan juga stakeholder yang terlibat. Dukungan yang diberikan berupa sudah tersedianya sumber daya manusia yang mendukung, dan kualitas produksi yang didapatkan sudah cukup baik.

c) Evaluasi

Dari berbagai manfaat yang didapatkan dengan adanya inovasi BAMELE, masih ada sebuah fakta lain yaitu belum adanya kebijakan mengenai inovasi BAMELE. Evaluasi perlu dilakukan mengingat tanpa adanya kebijakan khusus akan membuat sebuah inovasi tersebut berjalan tanpa arah dan tujuan yang di inginkan. Namun dari semua itu ada beberapa faktor yang menjadi penghambat.

2. Rekomendasi

Saran untuk pengembangan kawasan melalui inovasi BAMELE di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

- a) Bagi Dinas Pertanian:
 - (1) Perlunya support yang lebih baik lagi mengenai informasi-informasi tentang BAMELE.
 - (2) Untuk sosialisasi mengenai seputar inovasi BAMELE perlu dikembangkan lagi seperti dalam sosialisasi penyaluran distribusi hasil panen dari BAMELE.
 - (3) Perlunya perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana yang lebih modern.
- b) Bagi Pemerintah Desa:
 - (1) Perlunya peran aktif dari pemerintah desa dalam menggali potensi yang dimiliki desa.
 - (2) Lebih mampu dekat dengan warganya melalui pertemuan balai warga dan lain-lain.
- c) Bagi Masyarakat:
 - (1) Lebih aktif dalam berbagai informasi detail dalam memperoleh inovasi-inovasi baru terkait budidaya bawang merah.
 - (2) Jangan mudah percaya dengan adanya isu tentang kendala-kendala yang membuat inovasi BAMELE ini tidak berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Apriyanto, C., Hermini, R., & Sulistowati. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Dalam Pemberdayaan Petani Bawang Merah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–11.
- Fitriawati, R. K. (2017). Kajian Perilaku Prtani Dalam Budidaya Bawang Merah Pada Musim Kemarau dan Musim Hujan di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Swara Bhumi Journal*, 1(1), 13–22.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Prabowo, T. A. (2015). Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk. *Media Trend Journal*, 4(2), 183- 195.
- Rahmadona, L., Fariyanti, A., & Burhanuddin. (2017). Komunikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Saing Komuditas Bawang Merah di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 2(2), 37 - 51.

